



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif perlu menyusun Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 598);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif yang selanjutnya disebut Analisis Pemantauan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analisis Pemantauan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan susunan Analis Pemantauan sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan, penghitungan dan penentuan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan; dan
- b. tata cara pengusulan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN, DAN PENENTUAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN

Pasal 5

- (1) Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung beban kerja organisasi.

- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan pada dasarnya disebabkan lowongnya Formasi jabatan tersebut sesuai jenjang jabatan.
- (3) Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan terjadi apabila ada:
 - a. perubahan struktur organisasi;
 - b. kebutuhan Formasi jabatan;
 - c. Analisis Pemantauan pindah, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
 - d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 6

Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

- a. jumlah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
- b. jumlah permohonan pengujian peraturan perundang-undangan; dan
- c. jumlah putusan pengujian peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata cara penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 8

Format penghitungan Formasi masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Pasal 9

Contoh penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini.

BAB IV

**TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN**

Pasal 10

Tata cara pengusulan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan sebagai berikut:

- a. setiap instansi pengusul menyusun Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan;
- b. PPK instansi pengusul mengajukan usulan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan kepada Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi berupa surat pertimbangan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan;
- c. berdasarkan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPK instansi pengusul mengajukan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan kepada Menteri;
- d. Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usul dari PPK instansi pengusul, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan;
- e. Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada PPK instansi pengusul.
- f. PPK instansi pengusul setelah mendapat penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf e menyampaikan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan antara lain kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
4. Pihak yang berkepentingan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Januari 2021
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611441997031001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti. S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN**

Penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menginventarisasi seluruh kegiatan di bidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari unsur, sub unsur, dan butir kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan, yang dapat dinilai dengan Angka Kredit pada kolom 2, 3, dan 4 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
2. Menginventarisasi nilai Angka Kredit untuk setiap butir kegiatan masing-masing jenjang jabatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah sesuai standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan pada kolom 5 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
3. Jam Kerja Efektif sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan setahun sebesar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) jam, berdasarkan

jam kerja dinas 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu dikurangi waktu luang.

4. Menghitung Konstanta (**Kt**) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran Angka Kredit Tambahan (**AKT**), untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) untuk setiap kenaikan jabatan dan/ atau pangkat.
 - 1) **Analisis Pemantauan Ahli Pertama**, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b diperlukan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) sebanyak 50;
 - 2) **Analisis Pemantauan Ahli Pertama**, pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Analisis Pemantauan Ahli Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/c diperlukan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) sebanyak 50;
 - 3) **Analisis Pemantauan Ahli Muda**, pangkat Penata golongan ruang III/c, untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d diperlukan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) sebanyak 100;
 - 4) **Analisis Pemantauan Ahli Muda**, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Analisis Pemantauan Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a diperlukan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) sebanyak 100;
 - 5) **Analisis Pemantauan Ahli Madya**, pangkat Pembina golongan ruang IV/ a, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b diperlukan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) sebanyak 150;

- 6) **Analisis Pemantauan Ahli Madya**, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c diperlukan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) sebanyak 150;
 - 7) **Analisis Pemantauan Ahli Madya**, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Analisis Pemantauan Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d diperlukan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) sebanyak 150;
 - 8) **Analisis Pemantauan Ahli Utama**, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e diperlukan Angka Kredit Tambahan (**AKT**) sebanyak 200;
- b. Menetapkan Konstanta (**Kt**).

Berdasarkan besaran Angka Kredit Tambahan (**AKT**) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (**Kt**) untuk masing-masing jenjang jabatan yaitu dengan cara, Angka Kredit Tambahan (**AKT**) untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 tahun, atau dengan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{Kt = AKT: (1250 \times 4)}$$

Keterangan:

- Kt** = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.
- AKT** = Angka Kredit Tambahan untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/ atau pangkat
- 1250** = Jumlah standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

- 4** = Jumlah tahun masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yaitu 4 (empat) tahun.

Dengan demikian penghitungan Konstanta (**Kt**) untuk Analisis Pemantauan adalah sebagai berikut:

- 1) Konstanta (**Kt**) Analisis Pemantauan Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,010}$; (terdapat pada kolom 6 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Ahli Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II).
 - 2) Konstanta (**Kt**) Analisis Pemantauan Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,020}$; (terdapat pada kolom 6 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Ahli Muda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II).
 - 3) Konstanta (**Kt**) Analisis Pemantauan Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/c) = $150 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,030}$; (terdapat pada kolom 6 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Ahli Madya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II).
 - 4) Konstanta (**Kt**) Analisis Pemantauan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) = $200 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,040}$. (terdapat pada kolom 6 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Ahli Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II).
5. Menghitung Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (**WPK**) adalah dengan cara membagi Angka Kredit Butir kegiatan (**AKB**) dengan Konstanta (**Kt**) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif (terdapat pada kolom 7 Tabel Penghitungan

Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II), atau dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{WPK = AKB : Kt}$$

Keterangan:

WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

AKB = Angka Kredit Butir kegiatan masing-masing dalam 1 (satu) tahun.

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

6. Menghitung Volume (**V**) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari instansi (terdapat pada kolom 8 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II).
7. Menghitung Waktu Penyelesaian Volume (**WPV**) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan dengan cara mengalikan Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan (**WPK**) dengan volume (**V**) masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan (terdapat pada kolom 9 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II), atau dengan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{WPV = WPK \times V}$$

Keterangan:

WPV = Waktu Penyelesaian Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

WPK = Waktu Penyelesaian setiap butir Kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

8. Penentuan Formasi setiap butir kegiatan (**PFK**) (terdapat pada kolom 10 Tabel Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II) dengan formula sebagai berikut:

Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan = WPV : 1250

Keterangan:

Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan = Jumlah Analisis Pemantauan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan dibidang pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan pada instansi pengguna.

WPV = Waktu Penyelesaian Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

1250 = Jumlah standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

9. Penghitungan jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan didasarkan atas penghitungan Formasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan memperoleh nilai kurang dari 0,50,

maka tidak dapat ditetapkan Formasi untuk Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan.

- b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan memperoleh nilai dibelakang koma 0,50 atau lebih maka dapat ditetapkan 1 (satu) Formasi untuk Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan

Contoh :

Kegiatan pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan pada suatu instansi dalam setahun adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penanganan perkara pengujian undang-undang, analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi, serta penyusunan database peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun untuk jenjang Pertama adalah 19.152. Maka Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan untuk jenjang Pertama adalah :

$$\begin{aligned} \text{Formasi Jabatan} &= (\sum \text{WPV} / 1250) \times \text{orang} \\ \text{Fungsional Analisis} & \\ \text{Pemantauan} & \\ &= (19.152 / 1250) \\ &= 15,3216 \\ &= 15 \text{ orang (pembulatan ke bawah)} \end{aligned}$$

Jadi jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan untuk jenjang Pertama adalah 15 orang.

- 2) Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, penanganan perkara pengujian undang-undang, analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi, serta penyusunan *database* peraturan perundang-undangan

dalam 1 (satu) tahun untuk jenjang Madya adalah 11.892,67. Maka Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan untuk jenjang Madya adalah

Formasi Jabatan = $(\sum \text{WPV} / 1250) \times \text{orang}$
Fungsional Analis
Pemantauan

(11.892,67 / 1250)

9,5128

10 orang (pembulatan ke atas)

Jadi jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan untuk jenjang Madya adalah 10 orang.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611441997031001

LAMPIRAN II

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN FORMASI JABATAN ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

**FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN**

TABEL 1

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN AHLI PERTAMA

| No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit (Akb) | Konstanta (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK) | Volume Kegiatan dalam 1 (Satu) Tahun**) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (WPV) | Penentuan Jumlah Formasi (Formasi Analisis Pemantauan) | |
|----|---|-----------|---|---|----------------|---|---|--|--|--------|
| | | | | | 0,01 | AKB: Kt | (V) | WPK x V | \sum WPV/1.250 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | A | Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | 1 | | | | | | |
| | | | a | Menelaah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamankan peraturan pelaksanaan. | 0,62 | 0,01 | 62 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|------|------|----|---|------|--------|
| | | | | b | Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. | 0,66 | 0,01 | 66 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 2 | | Menyusun analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau | 0,49 | 0,01 | 49 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 3 | | Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai: | | | | | | |
| | | | | a | Penyaji | 0,4 | 0,01 | 40 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b | Peserta diskusi | 0,3 | 0,01 | 30 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 4 | | Menginventarisasi data kajian evaluasi | | | | | | |
| | | | | a | Hasil diskusi | 0,21 | 0,01 | 21 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b | Hasil studi pustaka | 0,21 | 0,01 | 21 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | c | Hasil seminar | 0,21 | 0,01 | 21 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | d | Hasil survei | 0,23 | 0,01 | 23 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | e | Hasil wawancara | 0,25 | 0,01 | 25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 5 | | Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk: | | | | | | |
| | | | | a | Infografis | 0,26 | 0,01 | 26 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | A | Persiapan dan Analisis Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | 6 | Menelaah berkas permohonan perkara pengujian undang-undang. | 0,26 | 0,01 | 26 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 7 | Menginventarisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang- | 0,3 | 0,01 | 30 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|---|------|------|----|---|------|--------|
| | | | | Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | | | | | | |
| | | | 8 | Menginventarisasi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan. | 0,39 | 0,01 | 39 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 9 | Menginventarisasi Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang. | 0,39 | 0,01 | 39 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 10 | Menginventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang. | 0,45 | 0,01 | 45 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 11 | Menginventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh dalam diskusi dengan pakar. | 0,34 | 0,01 | 34 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | B | Penyusunan dan Perbaikan draf Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | 12 | Menyusun draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan: | | | | | | |
| | | | a | menganalisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. | 0,31 | 0,01 | 31 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|---|------|------|----|---|------|--------|
| | | | | b | menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji. | 0,56 | 0,01 | 56 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 13 | | Mengikuti pemaparan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai: | | | | | | |
| | | | | a | Peserta | 0,15 | 0,01 | 15 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 14 | | Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan: | | | | | | |
| | | | | a | Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang | 0,13 | 0,01 | 13 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b | Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang | 0,22 | 0,01 | 22 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 15 | | Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi | 0,43 | 0,01 | 43 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 16 | | Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,42 | 0,01 | 42 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | A | Penyusunan draf Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan | 17 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai: | | | | | | |
| | | | | a | Peserta | 0,14 | 0,01 | 14 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 18 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|--|------|------|----|---|------|--------|
| | | | berdasarkan uji materi | | undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai: | | | | | | |
| | | | | a | Peserta | 0,21 | 0,01 | 21 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | B | Penyusunan Hasil Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 19 | Menyusun Himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan: | | | | | | |
| | | | | a | Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi | 0,51 | 0,01 | 51 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b | Bidang Urusan Komisi | 0,51 | 0,01 | 51 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 20 | Menyusun Himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sesuai dengan: | | | | | | |
| | | | | a | Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Agung | 0,51 | 0,01 | 51 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b | Bidang Urusan Komisi | 0,51 | 0,01 | 51 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 21 | Menyusun ringkasan perubahan dalam undang- undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,32 | 0,01 | 32 | 6 | 0 | 0,00 |
| | | | | 22 | Menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung. | 0,32 | 0,01 | 32 | 6 | 0 | 0,00 |
| 4 | Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan | A | Penyusunan Data Peraturan Perundang-undangan | 23 | Mengidentifikasi status peraturan perundang- undangan sesuai dengan tahun penetapan, berdasarkan: | | | | | | |
| | | | | a | Data klasifikasi peraturan perundang- undangan sesuai urusan pemerintahan | 0,14 | 0,01 | 14 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|--|------|------|----|--------|--------------|------------------|
| | | | b | Pemutakhiran data status peraturan perundang-undangan (mengubah/diubah, mencabut/dicabut) | 0,12 | 0,01 | 12 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,0000 0,0000 |
| | | | c | Data Tanggal pengesahan, Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara | 0,12 | 0,01 | 12 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | d | Penelusuran hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung | 0,19 | 0,01 | 19 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 24 | Menyusun daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun. | 0,12 | 0,01 | 12 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 25 | Mendata jumlah peraturan perundang-undangan per tahun. | 0,12 | 0,01 | 12 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | B | Penyusunan data undang-undang/ Peraturan Perundang-Undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi/MA | 26 | Melakukan kegiatan <i>input</i> data ke dalam sistem <i>database</i> atas pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung. | 0,27 | 0,01 | 27 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 27 | Melakukan kegiatan <i>input</i> data perkara ke dalam | 0,12 | 0,01 | 12 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 28 | Melakukan kegiatan <i>input</i> data putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung ke dalam <i>database</i> Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung. | 0,12 | 0,01 | 12 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|------|------|----|---------------------------------|------|---|
| | | | | 29 | Melakukan kegiatan <i>input</i> data kedalam <i>database</i> undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Agung. | 0,12 | 0,01 | 12 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | | JUMLAH | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | | $\frac{\sum \text{WPV}}{1.250}$ | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | | Pembulatan | | 0 Analisis Pemantauan Legislatif Ahli Pertama |

KETERANGAN :

*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

TABEL 2
PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN AHLI MUDA

| NO | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit (AKB) | Konstanta (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK) | Volume Kegiatan dalam 1 (Satu) Tahun**) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (WPKV) | Penentuan Jumlah Formasi (Formasi Analisis Pemantauan) | | |
|----|---|-----------|--|--------------------|--|---|---|---|--|------|--------|
| | | | | | 0,02 | AKB: Kt | (V) | WPK x V | $\sum WPKV/1.250$ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | A | Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | 1 | Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan: | | | | | | |
| | | | | a | Menelaah pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan lain. | 1,31 | 0,02 | 65,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b | Menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang | 0,63 | 0,02 | 31,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 2 | Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai Peserta diskusi | 0,6 | 0,02 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 | | |
| | | B | Pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan | 3 | Menyusun kerangka acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 0,6 | 0,02 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 4 | Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data. | 0,61 | 0,02 | 30,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|--|------|------|-------|---|------|--------|
| | | | | 5 | Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk: | | | | | | |
| | | | | a | Buku | 0,64 | 0,02 | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b | Infografis | 0,51 | 0,02 | 25,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang | A | Persiapan dan Analisis Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang | 6 | Menyusun resume hasil pengumpulan data. | 0,57 | 0,02 | 28,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 7 | Menganalisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan/atau keterangan Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan | 1,06 | 0,02 | 53,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 8 | Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi | 1,01 | 0,02 | 50,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | B | Penyusunan dan Perbaikan draf Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang | 9 | Menyusun draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan: | | | | | | |
| | | | | a | menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang | 0,66 | 0,02 | 33,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b | menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji | 1,11 | 0,02 | 55,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 10 | Menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah | 0,86 | 0,02 | 43,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 11 | Menyusun perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau | 0,91 | 0,02 | 45,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------|---|---|------|-------|-------|------|--------|--------|
| | | | | Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang. | | | | | | | |
| | | | 12 | Mengikuti pemaparan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai: | | | | | | | |
| | | | a | Penyaji | 0,39 | 0,02 | 19,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| | | | b | Peserta | 0,3 | 0,02 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| | | | 13 | Menyusun perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi. | 0,32 | 0,02 | 16,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| | | | 14 | Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan: | | | | | | | |
| | | | a | Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang | 0,25 | 0,02 | 12,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| | | | b | Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang. | 0,43 | 0,02 | 21,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| | | | 15 | Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,87 | 0,02 | 43,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| | | | 16 | Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,84 | 0,02 | 42,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| 3 | Analisis undang- | A | Penyusunan draf Analisis | 17 | Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,51 | 0,02 | 25,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|------|------|-------|---|------|--------|
| undang/ peraturan perundang- undangan berdasarkan uji materi | undang- undang/per aturan perundang- undangan berdasarkan uji materi | 18 | Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung. | 0,47 | 0,02 | 23,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 19 | Menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,26 | 0,02 | 63,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 20 | Menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung | 0,78 | 0,02 | 39,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 21 | Menyusun draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,31 | 0,02 | 65,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 22 | Menyusun draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. | 0,95 | 0,02 | 47,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 23 | Menyusun konsep paparan hasil draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,37 | 0,02 | 18,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 24 | Menyusun konsep paparan hasil draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,3 | 0,02 | 15,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 25 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai: | | | | | | |
| | | a | Penyaji | 0,44 | 0,02 | 22,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | b | Peserta | 0,28 | 0,02 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | 26 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai: | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|---|------|------|-------|--------------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | a | Penyaji | 1,12 | 0,02 | 56,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | b | Peserta | 0,42 | 0,02 | 21,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 27 | Merevisi draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi | 0,64 | 0,02 | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 28 | Merevisi draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi | 0,63 | 0,02 | 31,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | B | Penyusunan Hasil Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 29 | Menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,63 | 0,02 | 31,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 30 | Menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung. | 0,63 | 0,02 | 31,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | JUMLAH | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | $\frac{\sum WPV}{1.250}$ | 0,00/1250 | 0,0000 |
| | | | | | | | | Pembulatan | | 0 Analisis Pemantauan Ahli Muda |

KETERANGAN :

*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan

TABEL 3

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN AHLI MADYA

| No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit (AKB) | Konstanta (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk) | Volume Kegiatan dalam 1 (Satu) Tahun**) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (WPV) | Penentuan Jumlah Formasi | | | |
|----|---|-----------|---|--------------------|---|---|---|--|---|------|--------|--|
| | | | | | 0,03 | AKB: Kt | (V) | WPK x V | (Formasi Analisis Pemantauan) $\sum WPV/1.250$ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | A | Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | 1 | Menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. | 2,17 | 0,03 | 72,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| | | | | 2 | Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan: | | | | | | | |
| | | | | a | Menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang | 0,94 | 0,03 | 31,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| | | | | 3 | Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai: | | | | | | | |
| | | | | a | Peserta diskusi | 0,89 | 0,03 | 29,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 | |
| 4 | Menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau. | 1,58 | 0,03 | 52,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|----|--|------|------|-------|---|------|--------|
| | | B | Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan | 5 | Menyusun Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 0,9 | 0,03 | 30,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 6 | Menyusun instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan | 1,94 | 0,03 | 64,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 7 | Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data. | 0,92 | 0,03 | 30,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 8 | Menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 1,75 | 0,03 | 58,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 9 | Menyusun <i>executive summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 1,75 | 0,03 | 58,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 10 | Menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan | 1,78 | 0,03 | 59,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 11 | Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk: | | | | | | |
| | | | | a | Infografis | 0,77 | 0,03 | 25,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Penanganan Perkara Pengujian | A | Persiapan dan Analisis Penanganan Perkara | 12 | Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang- | 1,51 | 0,03 | 50,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----|---|------|------|-------|---|------|--------|
| undang-undang | B | Pengujian undang-undang dan Perbaikan draf Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | 13 | undang di Mahkamah Konstitusi | | | | | | |
| | | | | Menyusun draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan: | | | | | | |
| | | | a | menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang | 0,99 | 0,03 | 33,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 14 | Menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah. | 1,29 | 0,03 | 43,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 15 | Menyusun perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang. | 1,36 | 0,03 | 45,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 16 | Mengikuti pemaparan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai: | | | | | | |
| | | | a | Penyaji | 0,58 | 0,03 | 19,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | b | Peserta | 0,46 | 0,03 | 15,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 17 | Menyusun perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan | 0,48 | 0,03 | 16,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------|------|-------|---|------|--------|
| | | | | (saran/rekomendasi) dalam presentasi. | | | | | | |
| | | | | 18 Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan: | | | | | | |
| | | | | a Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang. | 0,38 | 0,03 | 12,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | b Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang. | 0,65 | 0,03 | 21,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 19 Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi | 1,3 | 0,03 | 43,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 20 Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,26 | 0,03 | 42,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | A | Penyusunan draf Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 21 Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,76 | 0,03 | 25,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 22 Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung. | 0,7 | 0,03 | 23,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 23 Menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,89 | 0,03 | 63,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 24 Menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung. | 1,18 | 0,03 | 39,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|------|------|-------|---|------|--------|
| | | | 25 | Menyusun draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,97 | 0,03 | 65,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 26 | Menyusun draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. | 1,42 | 0,03 | 47,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 27 | Menyusun konsep paparan hasil draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,56 | 0,03 | 18,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 28 | Menyusun konsep paparan hasil draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. | 0,44 | 0,03 | 14,67 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 29 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai: | | | | | | |
| | | | a | Penyaji | 0,67 | 0,03 | 22,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | b | Peserta | 0,42 | 0,03 | 14,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 30 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai: | | | | | | |
| | | | a | Penyaji | 1,69 | 0,03 | 56,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | b | Peserta | 0,63 | 0,03 | 21,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 31 | Merevisi draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan | 0,96 | 0,03 | 32,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|------|------|-------|---------------------|------------|--------------------------------|
| | | | | Mahkamah Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi. | | | | | | |
| | | | 32 | Merevisi draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi. | 0,94 | 0,03 | 31,33 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | JUMLAH | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | Σ WPV/ 1.250 | 0,00/1.250 | 0,0000 |
| | | | | | | | | Pembulatan | | 0 Analis Pemantauan Ahli Madya |

KETERANGAN :

*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

TABEL 4

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN LEGISLATIF AHLI UTAMA

| No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit (AKB) | Konstanta (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK) | Volume Kegiatan dalam 1 (Satu) Tahun**) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (WPV) | Penentuan Jumlah Formasi | | |
|----|---|-----------|---|--------------------|---|---|---|--|-----------------------------|------|--------|
| | | | | | | AKB: Kt | (V) | WPK x V | (Formasi Analis Pemantauan) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | A | Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | 1 | Menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. | 2,89 | 0,04 | 72,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 2 | Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi. | 1,19 | 0,04 | 29,75 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 3 | Menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau. | 2,11 | 0,04 | 52,75 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | B | Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan | 4 | Mereview laporan hasil analisis evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 2,21 | 0,04 | 55,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 5 | Menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 2,33 | 0,04 | 58,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 6 | Menyusun <i>executive summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 2,33 | 0,04 | 58,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 7 | Menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 2,37 | 0,04 | 59,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|---|------|------|--------|---|------|--------|
| | | | 8 | Menyusun <i>policy brief</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 4,19 | 0,04 | 104,75 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 9 | Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan dalam bentuk infografis. | 1,03 | 0,04 | 25,75 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| 2 | Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | A | 10 | Menyusun draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang. | 1,32 | 0,04 | 33,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 11 | Mengikuti pemaparan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta. | 0,61 | 0,04 | 15,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 12 | Memvalidasi perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah. | 2,4 | 0,04 | 60,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 13 | Menyusun <i>excecutive summary</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dalam Persidangan pengujian undang-undang dengan: | 2,08 | 0,04 | 52,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 14 | Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan: | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|---|------|------|-------|---|------|--------|
| | | | | 15 | a | Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang. | 0,5 | 0,04 | 12,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | b | Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang. | 0,87 | 0,04 | 21,75 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 16 | | Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,74 | 0,04 | 43,50 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 17 | | Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,69 | 0,04 | 42,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | A | Penyusunan draf Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 18 | | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai peserta. | 0,57 | 0,04 | 14,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 19 | | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai peserta. | 0,84 | 0,04 | 21,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 20 | | Memvalidasi hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | 2,25 | 0,04 | 56,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | 21 | | Memvalidasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung | 2,25 | 0,04 | 56,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | B | Penyusunan Hasil Analisis undang-undang/peraturan perundang- | 22 | | Menyusun anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi | 3,29 | 0,04 | 82,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | undangan | 23 | | Menyusun anotasi perubahan peraturan perundang-undangan akibat putusan Mahkamah Agung. | 3,32 | 0,04 | 83,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----|--|------|------|--------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | undangan berdasarkan uji materi | 24 | Menyusun <i>Policy Brief</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | 4,33 | 0,04 | 108,25 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | 25 | Menyusun <i>Policy Brief</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. | 4,28 | 0,04 | 107,00 | 0 | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | JUMLAH | 0,00 | 0,0000 |
| | | | | | | | | Σ WPV/ 1.250 | 0,00/1.250 | 0,0000 |
| | | | | | | | | Pembulatan | | 0 Analisis Pemantauan Ahli Utama |

KETERANGAN :

*) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR
NIP. 196611441997031001

LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF

**CONTOH PENGHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN**

**TABEL 1
PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN AHLI PERTAMA**

| No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit (Akb) | Konstanta (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK) | Volume Kegiatan dalam 1 (Satu) Tahun** (V) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (WPV) | Penentuan Jumlah Formasi | | |
|----|---|-----------|---|---|---|---|--|--|---|--------|--------|
| | | | | | 0,01 | AKB: Kt | (V) | WPK x V | (Formasi Analisis Pemantauan) $\sum WPV / 1.250$ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | A | Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | 1 | Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan: | | | | | | |
| | | | | a | Menelaah pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengamatkan peraturan pelaksanaan. | 0,62 | 0,01 | 62 | 18 | 1116 | 0,8928 |
| | | | | b | Menelusuri peraturan pelaksanaan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. | 0,66 | 0,01 | 66 | 18 | 1188 | 0,9504 |
| | | | 2 | Menyusun analisis ringkas peraturan perundang-undangan yang akan dipantau | 0,49 | 0,01 | 49 | 18 | 882 | 0,7056 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|------|------|----|----|-----|--------|
| | | | | 3 | Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai: | | | | | | |
| | | | | a | Penyaji | 0,4 | 0,01 | 40 | 18 | 720 | 0,576 |
| | | | | b | Peserta diskusi | 0,3 | 0,01 | 30 | 18 | 540 | 0,432 |
| | | | | 4 | Menginventarisasi data kajian evaluasi | | | | | | |
| | | | | a | Hasil diskusi | 0,21 | 0,01 | 21 | 18 | 378 | 0,3024 |
| | | | | b | Hasil studi pustaka | 0,21 | 0,01 | 21 | 18 | 378 | 0,3024 |
| | | | | c | Hasil seminar | 0,21 | 0,01 | 21 | 18 | 378 | 0,3024 |
| | | | | d | Hasil survei | 0,23 | 0,01 | 23 | 18 | 414 | 0,3312 |
| | | | | e | Hasil wawancara | 0,25 | 0,01 | 25 | 18 | 450 | 0,36 |
| | | | | 5 | Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk: | | | | | | |
| | | | | a | Infografis | 0,26 | 0,01 | 26 | 18 | 468 | 0,3744 |
| 2 | Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | A | Persiapan dan Analisis Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | 6 | Menelaah berkas permohonan perkara pengujian undang-undang. | 0,26 | 0,01 | 26 | 18 | 468 | 0,3744 |
| | | | | 7 | Menginventarisasi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait dengan undang-undang yang diajukan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | 0,3 | 0,01 | 30 | 18 | 540 | 0,432 |
| | | | | 8 | Menginventarisasi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diuji dan undang-undang lainnya yang terkait dengan undang-undang yang diujikan. | 0,39 | 0,01 | 39 | 18 | 702 | 0,5616 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|---|------|------|----|----|------|--------|
| | | | 9 | Menginventarisasi Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah terdahulu yang terkait dengan undang-undang yang diujikan dalam permohonan perkara pengujian undang-undang. | 0,39 | 0,01 | 39 | 18 | 702 | 0,5616 |
| | | | 10 | Menginventarisasi risalah pembahasan undang-undang yang diuji dalam permohonan perkara pengujian undang-undang. | 0,45 | 0,01 | 45 | 18 | 810 | 0,648 |
| | | | 11 | Menginventarisasi data informasi dan rekomendasi yang diperoleh dalam diskusi dengan pakar. | 0,34 | 0,01 | 34 | 18 | 612 | 0,4896 |
| | B | Penyusunan dan Perbaikan draf Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | 12 | Menyusun draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan: | | | | | 0 | 0 |
| | | | a | Menganalisis kedudukan hukum pemohon dalam permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. | 0,31 | 0,01 | 31 | 18 | 558 | 0,4464 |
| | | | b | Menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji. | 0,56 | 0,01 | 56 | 18 | 1008 | 0,8064 |
| | | | 13 | Mengikuti pemaparan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai: | | | | | | |
| | | | a | Peserta | 0,15 | 0,01 | 15 | 18 | 270 | 0,216 |
| | | | 14 | Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan: | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|---|------|------|----|----|-----|--------|
| | | | | a | Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang | 0,13 | 0,01 | 13 | 18 | 234 | 0,1872 |
| | | | | b | Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang | 0,22 | 0,01 | 22 | 18 | 396 | 0,3168 |
| | | | 15 | | Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi | 0,43 | 0,01 | 43 | 18 | 774 | 0,6192 |
| | | | 16 | | Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,42 | 0,01 | 42 | 18 | 756 | 0,6048 |
| 3 | Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | A | Penyusunan draf Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 17 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai: | | | | | | |
| | | | | a | Peserta | 0,14 | 0,01 | 14 | 6 | 84 | 0,0672 |
| | | | | 18 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai: | | | | | | |
| | | | | a | Peserta | 0,21 | 0,01 | 21 | 6 | 126 | 0,1008 |
| | | B | Penyusunan Hasil Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 19 | Menyusun Himpunan hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan: | | | | | | |
| | | | | a | Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi | 0,51 | 0,01 | 51 | 6 | 306 | 0,2448 |
| | | | | b | Bidang Urusan Komisi | 0,51 | 0,01 | 51 | 6 | 306 | 0,2448 |
| | | | | 20 | Menyusun Himpunan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sesuai dengan: | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|------|------|----|----|-----|--------|
| | | | | a | Tahun Penetapan Putusan Mahkamah Agung | 0,51 | 0,01 | 51 | 6 | 306 | 0,2448 |
| | | | | b | Bidang Urusan Komisi | 0,51 | 0,01 | 51 | 6 | 306 | 0,2448 |
| | | | 21 | | Menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,32 | 0,01 | 32 | 6 | 192 | 0,1536 |
| | | | 22 | | Menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung. | 0,32 | 0,01 | 32 | 6 | 192 | 0,1536 |
| 4 | Penyusunan Database Peraturan Perundang-undangan | A | Penyusunan Data Peraturan Perundang-undangan | 23 | Mengidentifikasi status peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahun penetapan, berdasarkan: | | | | | | |
| | | | | a | Data klasifikasi peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan | 0,14 | 0,01 | 14 | 18 | 252 | 0,2016 |
| | | | | b | Pemutakhiran data status peraturan perundang-undangan (mengubah/diubah, mencabut/dicabut) | 0,12 | 0,01 | 12 | 18 | 216 | 0,1728 |
| | | | | c | Data Tanggal pengesahan, Nomor Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara | 0,12 | 0,01 | 12 | 18 | 216 | 0,1728 |
| | | | | d | Penelusuran hasil pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung | 0,19 | 0,01 | 19 | 18 | 342 | 0,2736 |
| | | | | 24 | Menyusun daftar peraturan perundang-undangan sesuai urusan pemerintahan per tahun. | 0,12 | 0,01 | 12 | 18 | 216 | 0,1728 |
| | | | | 25 | Mendata jumlah peraturan perundang-undangan per tahun. | 0,12 | 0,01 | 12 | 18 | 216 | 0,1728 |
| | | B | Penyusunan data undang-undang/Peraturan Perundang- | 26 | Melakukan kegiatan <i>input</i> data ke dalam sistem <i>database</i> atas pasal/ayat undang-undang yang dibatalkan Mahkamah | 0,27 | 0,01 | 27 | 18 | 486 | 0,3888 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|------|----|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | | | Undangan pascaputusan Mahkamah Konstitusi/MA | Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Agung. | | | | | | | |
| | | | | 27 | Melakukan kegiatan <i>input</i> data perkara ke dalam | 0,12 | 0,01 | 12 | 18 | 216 | 0,1728 |
| | | | | 28 | Melakukan kegiatan <i>input</i> data putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung ke dalam <i>database</i> Putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung. | 0,12 | 0,01 | 12 | 18 | 216 | 0,1728 |
| | | | | 29 | Melakukan kegiatan <i>input</i> data kedalam <i>database</i> undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Konstitusi/peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diubah akibat Putusan Mahkamah Agung. | 0,12 | 0,01 | 12 | 18 | 216 | 0,1728 |
| | | | | | | | | | JUMLAH | 19.152 | 15,3216 |
| | | | | | | | | | $\frac{\sum WPV}{1.250}$ | $\frac{19.152}{1.250}$ | 15,3216 |
| | | | | | | | | | Pembulatan | | 15 Analis Pemantauan Ahli Pertama |

Total Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Ahli Pertama adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan} &= (\sum WPV / 1250) \times \text{orang} \\
 &= (19.152 / 1250) \\
 &= 15,3216 \\
 &= 15 \text{ orang (pembulatan ke bawah)}
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan untuk jenjang Ahli Pertama adalah 15 orang.

TABEL 2

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN AHLI MUDA

| NO | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | | Angka Kredit (AKB) | Konstanta (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK) | Volume Kegiatan dalam 1 (Satu Tahun**) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (WPV) | Penentuan Jumlah Formasi |
|----|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | 0,02 | AKB: Kt | (V) | WPK x V | (Formasi Analisis Pemantauan) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | A Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | 1 | Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan: | | | | | | |
| | | | | a | Menelaah pasal-pasal yang terkait peraturan perundang-undangan lain. | 1,31 | 0,02 | 65,50 | 18 | 1179,00 |
| | | | b | Menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang | 0,63 | 0,02 | 31,50 | 18 | 567,00 | 0,45 |
| | | | 2 | Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai Peserta diskusi | 0,6 | 0,02 | 30,00 | 18 | 540,00 | 0,43 |
| | | B Pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan | 3 | Menyusun Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 0,6 | 0,02 | 30,00 | 18 | 540,00 | 0,43 |
| | | | 4 | Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data. | 0,61 | 0,02 | 30,50 | 18 | 549,00 | 0,44 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|--|------|------|-------|----|--------|------|
| | | | 5 | Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk: | | | | | | |
| | | | a | Buku | 0,64 | 0,02 | 32,00 | 18 | 576,00 | 0,46 |
| | | | b | Infografis | 0,51 | 0,02 | 25,50 | 18 | 459,00 | 0,37 |
| 2 | Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang | A | 6 | Menyusun resume hasil pengumpulan data. | 0,57 | 0,02 | 28,50 | 14 | 399,00 | 0,32 |
| | | | 7 | Menganalisis keterkaitan antar pasal undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, dan/atau keterangan Dewan Perwakilan Daerah terdahulu, Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu terhadap pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan | 1,06 | 0,02 | 53,00 | 14 | 742,00 | 0,59 |
| | | | 8 | Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi | 1,01 | 0,02 | 50,50 | 14 | 707,00 | 0,57 |
| | | B | 9 | Menyusun draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan: | | | | | | |
| | | | a | menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang | 0,66 | 0,02 | 33,00 | 14 | 462,00 | 0,37 |
| | | | b | menelaah risalah pembahasan rancangan undang-undang terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang diuji | 1,11 | 0,02 | 55,50 | 14 | 777,00 | 0,62 |
| | | | 10 | Menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah | 0,86 | 0,02 | 43,00 | 14 | 602,00 | 0,48 |
| | | | 11 | Menyusun perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan | 0,91 | 0,02 | 45,50 | 14 | 637,00 | 0,51 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|---|---|------|-------|-------|--------|--------|------|
| | | | | perbaiki permohonan perkara pengujian undang-undang. | | | | | | | |
| | | | 12 | Mengikuti pemaparan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai: | | | | | | | |
| | | | a | Penyaji | 0,39 | 0,02 | 19,50 | 14 | 273,00 | 0,22 | |
| | | | b | Peserta | 0,3 | 0,02 | 15,00 | 14 | 210,00 | 0,17 | |
| | | | 13 | Menyusun perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi. | 0,32 | 0,02 | 16,00 | 14 | 224,00 | 0,18 | |
| | | | 14 | Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan: | | | | | | | |
| | | | 15 | a Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang | 0,25 | 0,02 | 12,50 | 14 | 175,00 | 0,14 | |
| | | | | b Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang | 0,43 | 0,02 | 21,50 | 14 | 301,00 | 0,24 | |
| | | | 16 | Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,87 | 0,02 | 43,50 | 14 | 609,00 | 0,49 | |
| | | | 17 | Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,84 | 0,02 | 42,00 | 14 | 588,00 | 0,47 | |
| 3 | Analisis undang-undang/peraturan | A | Penyusunan draf Analisis undang-undang/pera | 18 | Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,51 | 0,02 | 25,50 | 6 | 153,00 | 0,12 |
| | | | | 19 | Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung. | 0,47 | 0,02 | 23,50 | 6 | 141,00 | 0,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|------|------|-------|---|--------|------|
| perundang-undangan berdasarkan uji materi | aturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 20 | Menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,26 | 0,02 | 63,00 | 6 | 378,00 | 0,30 |
| | | 21 | Menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung | 0,78 | 0,02 | 39,00 | 6 | 234,00 | 0,19 |
| | | 22 | Menyusun draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,31 | 0,02 | 65,50 | 6 | 393,00 | 0,31 |
| | | 23 | Menyusun draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. | 0,95 | 0,02 | 47,50 | 6 | 285,00 | 0,23 |
| | | 24 | Menyusun konsep paparan hasil draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,37 | 0,02 | 18,50 | 6 | 111,00 | 0,09 |
| | | 25 | Menyusun konsep paparan hasil draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,3 | 0,02 | 15,00 | 6 | 90,00 | 0,07 |
| | | 26 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai: | | | | | | |
| | | a | Penyaji | 0,44 | 0,02 | 22,00 | 6 | 132,00 | 0,11 |
| | | b | Peserta | 0,28 | 0,02 | 14,00 | 6 | 84,00 | 0,07 |
| | | 27 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai: | | | | | | |
| | | a | Penyaji | 1,12 | 0,02 | 56,00 | 6 | 336,00 | 0,27 |
| | | b | Peserta | 0,42 | 0,02 | 21,00 | 6 | 126,00 | 0,10 |
| | | 28 | Merevisi draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan | 0,64 | 0,02 | 32,00 | 6 | 192,00 | 0,15 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|---|------|------|-------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | | | Mahkamah Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi | | | | | | |
| | | 29 | Merevisi draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi | 0,63 | 0,02 | 31,50 | 6 | 189,00 | 0,15 |
| | B | 30 | Menyusun ringkasan perubahan dalam undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,63 | 0,02 | 31,50 | 6 | 189,00 | 0,15 |
| | | 31 | Menyusun ringkasan perubahan dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang akibat putusan Mahkamah Agung. | 0,63 | 0,02 | 31,50 | 6 | 189,00 | 0,15 |
| | | | | | | | JUMLAH | 14.338 | 11,4704 |
| | | | | | | | $\frac{\sum \text{WPV}}{1.250}$ | $\frac{14.338}{1.250}$ | 11,4704 |
| | | | | | | | Pembulatan | | 11 Analis Pemantauan Ahli Muda |

Total Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Muda adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan} &= (\sum \text{WPV} / 1250) \times \text{orang} \\
 &= (14.338 / 1.250) \\
 &= 11,4704 \\
 &= 11 \text{ orang (pembulatan ke bawah)}
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan untuk jenjang Ahli Muda adalah 11 orang.

TABEL 3
PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN AHLI MADYA

| No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit (AKB) | Konstant a (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk) | Volume Kegiatan dalam 1 (Satu) Tahun**) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (WPV) | Penentuan Jumlah Formasi | | |
|----|---|-----------|---|--------------------|--|---|---|--|---|--------|--------|
| | | | | | 0,03 | AKB: Kt | (V) | WPK x V | (Formasi Analisis Pemantauan) $\sum WPV / 1.250$ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | A | Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | 1 | Menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. | 2,17 | 0,03 | 72,33 | 12 | 868,00 | 0,69 |
| | | | | 2 | Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, dengan: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | a | Menelaah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang | 0,94 | 0,03 | 31,33 | 12 | 376,00 |
| | | | | 3 | Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau, sebagai: | | | | | | 0,00 |
| | | | | | a | Peserta diskusi | 0,89 | 0,03 | 29,67 | 12 | 356,00 |
| | | 4 | Menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau. | 1,58 | 0,03 | 52,67 | 12 | 632,00 | 0,51 | | |
| | | B | Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan | 5 | Menyusun Kerangka Acuan kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 0,9 | 0,03 | 30,00 | 12 | 360,00 | 0,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|--|------|------|-------|----|--------|------|
| | | | | 6 | Menyusun instrumen pengumpulan data kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan | 1,94 | 0,03 | 64,67 | 12 | 776,00 | 0,62 |
| | | | | 7 | Menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau berdasarkan hasil pengumpulan data. | 0,92 | 0,03 | 30,67 | 12 | 368,00 | 0,29 |
| | | | | 8 | Menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 1,75 | 0,03 | 58,33 | 12 | 700,00 | 0,56 |
| | | | | 9 | Menyusun <i>executive summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 1,75 | 0,03 | 58,33 | 12 | 700,00 | 0,56 |
| | | | | 10 | Menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan | 1,78 | 0,03 | 59,33 | 12 | 712,00 | 0,57 |
| | | | | 11 | Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk: | | | | | | 0,00 |
| | | | | a | Infografis | 0,77 | 0,03 | 25,67 | 12 | 308,00 | 0,25 |
| 2 | Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | A | Persiapan dan Analisis Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | 12 | Menelaah teori hukum dan teori-teori lainnya yang terkait dengan materi permohonan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi | 1,51 | 0,03 | 50,33 | 14 | 704,67 | 0,56 |
| | | B | Penyusunan dan Perbaikan draf Penanganan | 13 | Menyusun draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah, dengan: | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----|---|--|------|-------|-------|--------|--------|------|
| | | Perkara Pengujian undang-undang | a | Menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang | 0,99 | 0,03 | 33,00 | 14 | 462,00 | 0,37 | |
| | | | 14 | Menelaah data dan informasi untuk penyusunan perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah. | 1,29 | 0,03 | 43,00 | 14 | 602,00 | 0,48 | |
| | | | 15 | Menyusun perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang. | 1,36 | 0,03 | 45,33 | 14 | 634,67 | 0,51 | |
| | | | 16 | Mengikuti pemaparan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang, sebagai: | | | | | | | 0,00 |
| | | | | a | Penyaji | 0,58 | 0,03 | 19,33 | 14 | 270,67 | 0,22 |
| | | | | b | Peserta | 0,46 | 0,03 | 15,33 | 14 | 214,67 | 0,17 |
| | | | 17 | Menyusun perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan masukan (saran/rekomendasi) dalam presentasi. | | 0,48 | 0,03 | 16,00 | 14 | 224,00 | 0,18 |
| | | | 18 | Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang, dengan: | | | | | | | 0,00 |
| | | | | a | Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam | 0,38 | 0,03 | 12,67 | 14 | 177,33 | 0,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|------|------|-------|----|--------|------|
| | | | | | persidangan pengujian undang-undang | | | | | | |
| | | | | b | Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang | 0,65 | 0,03 | 21,67 | 14 | 303,33 | 0,24 |
| | | | 19 | | Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi | 1,3 | 0,03 | 43,33 | 14 | 606,67 | 0,49 |
| | | | 20 | | Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,26 | 0,03 | 42,00 | 14 | 588,00 | 0,47 |
| 3 | Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | A | Penyusunan draf Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 21 | Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,76 | 0,03 | 25,33 | 2 | 50,67 | 0,04 |
| | | | | 22 | Menelaah putusan yang mengabulkan dari putusan Mahkamah Agung. | 0,7 | 0,03 | 23,33 | 2 | 46,67 | 0,04 |
| | | | | 23 | Menelaah akibat hukum undang-undang dari putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,89 | 0,03 | 63,00 | 2 | 126,00 | 0,10 |
| | | | | 24 | Menelaah akibat hukum peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari putusan Mahkamah Agung. | 1,18 | 0,03 | 39,33 | 2 | 78,67 | 0,06 |
| | | | | 25 | Menyusun draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,97 | 0,03 | 65,67 | 2 | 131,33 | 0,11 |
| | | | | 26 | Menyusun draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. | 1,42 | 0,03 | 47,33 | 2 | 94,67 | 0,08 |
| | | | | 27 | Menyusun konsep paparan hasil draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. | 0,56 | 0,03 | 18,67 | 2 | 37,33 | 0,03 |
| | | | | 28 | Menyusun konsep paparan hasil draf analisis dan evaluasi peraturan perundang- | 0,44 | 0,03 | 14,67 | 2 | 29,33 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|------|------|-------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | undangan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. | | | | | | |
| | | | 29 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai: | | | | | | 0,00 |
| | | | a | Penyaji | 0,67 | 0,03 | 22,33 | 2 | 44,67 | 0,04 |
| | | | b | Peserta | 0,42 | 0,03 | 14,00 | 2 | 28,00 | 0,02 |
| | | | 30 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai: | | | | | | 0,00 |
| | | | a | Penyaji | 1,69 | 0,03 | 56,33 | 2 | 112,67 | 0,09 |
| | | | b | Peserta | 0,63 | 0,03 | 21,00 | 2 | 42,00 | 0,03 |
| | | | 31 | Merevisi draf analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi. | 0,96 | 0,03 | 32,00 | 2 | 64,00 | 0,05 |
| | | | 32 | Merevisi draf analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sesuai masukan-masukan yang ada pada saat presentasi. | 0,94 | 0,03 | 31,33 | 2 | 62,67 | 0,05 |
| | | | | | | | | JUMLAH | 11.892,67 | 9,5141 |
| | | | | | | | | $\frac{\sum \text{WPV}}{1.250}$ | $\frac{11.892,67}{1.250}$ | 9,5141 |
| | | | | | | | | Pembulatan | | 10 Analis Pemantauan Ahli Madya |

Total Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Ahli Madya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan} &= (\sum \text{WPV} / 1250) \times \text{orang} \\ &= (11.892,67 / 1250) \\ &= 9,5141 \\ &= 10 \text{ orang (pembulatan ke atas)} \end{aligned}$$

Jadi jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan untuk jenjang Ahli Madya adalah 10 orang.

TABEL 4

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANTAUAN AHLI UTAMA

| No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit (AKB) | Konstanta (Kt) | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (WPK) | Volume Kegiatan dalam 1 (Satu) Tahun** (V) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (WPV) | Penentuan Jumlah Formasi (Formasi Analisis Pemantauan) | | |
|----|---|-----------|---|--------------------|---|---|--|--|--|--------------------|------|
| | | | | | | AKB: Kt | | WPK x V | | \sum WPV / 1.250 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | A | Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan | 1 | Menyusun rencana pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. | 2,89 | 0,04 | 72,25 | 12 | 867,00 | 0,69 |
| | | | | 2 | Melakukan diskusi hasil analisis ringkas terkait peraturan perundang-undangan yang akan dipantau sebagai peserta diskusi. | 1,19 | 0,04 | 29,75 | 12 | 357,00 | 0,29 |
| | | | | 3 | Menyusun rekomendasi peraturan perundang-undangan yang akan dipantau. | 2,11 | 0,04 | 52,75 | 12 | 633,00 | 0,51 |
| | | B | Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Perundang-undangan | 4 | Mereview laporan hasil analisis evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 2,21 | 0,04 | 55,25 | 12 | 663,00 | 0,53 |
| | | | | 5 | Menyusun laporan hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 2,33 | 0,04 | 58,25 | 12 | 699,00 | 0,56 |
| | | | | 6 | Menyusun <i>executive summary</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 2,33 | 0,04 | 58,25 | 12 | 699,00 | 0,56 |
| | | | | 7 | Menyusun kajian singkat hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 2,37 | 0,04 | 59,25 | 12 | 711,00 | 0,57 |
| | | | | 8 | Menyusun <i>policy brief</i> hasil kajian evaluasi pemantauan peraturan perundang-undangan. | 4,19 | 0,04 | 104,75 | 12 | 1257,00 | 1,01 |
| | | | | 9 | Menyusun bahan publikasi hasil kajian evaluasi pemantauan | 1,03 | 0,04 | 25,75 | 12 | 309,00 | 0,25 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|--|------|------|-------|----|--------|------|
| | | | | | peraturan perundang-undangan dalam bentuk infografis. | | | | | | |
| 2 | Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | A | Penyusunan dan Perbaikan draf Penanganan Perkara Pengujian undang-undang | 10 | Menyusun draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah dengan menganalisis pokok permohonan perkara pengujian undang-undang. | 1,32 | 0,04 | 33,00 | 14 | 462,00 | 0,37 |
| | | | | 11 | Mengikuti pemaparan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan perbaikan permohonan perkara pengujian undang-undang sebagai peserta. | 0,61 | 0,04 | 15,25 | 14 | 213,50 | 0,17 |
| | | | | 12 | Memvalidasi perbaikan draf Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah. | 2,4 | 0,04 | 60,00 | 14 | 840,00 | 0,67 |
| | | | | 13 | Menyusun <i>executive summary</i> Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Daerah untuk dibacakan oleh Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah dalam Persidangan pengujian undang-undang dengan: | 2,08 | 0,04 | 52,00 | 14 | 728,00 | 0,58 |
| | | | | 14 | Melakukan kegiatan pendampingan kepada Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah di persidangan pengujian undang-undang dengan: | | | | | | |
| | | | | 15 | a Mencatat pokok-pokok substansi perkara pengujian undang-undang dalam persidangan pengujian undang-undang | 0,5 | 0,04 | 12,50 | 14 | 175,00 | 0,14 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----|---|------|------|--------|----|--------|------|
| | | | 16 | b | Menyusun laporan proses persidangan pengujian undang-undang | 0,87 | 0,04 | 21,75 | 14 | 304,50 | 0,24 |
| | | | 17 | | Menyusun resume Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,74 | 0,04 | 43,50 | 14 | 609,00 | 0,49 |
| | | | 18 | | Menyusun Info <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi. | 1,69 | 0,04 | 42,25 | 14 | 591,50 | 0,47 |
| 3 | Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | A | Penyusunan draf Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 19 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai peserta. | 0,57 | 0,04 | 14,25 | 2 | 28,50 | 0,02 |
| | | | | 20 | Mengikuti pemaparan draf hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, sebagai peserta. | 0,84 | 0,04 | 21,00 | 2 | 42,00 | 0,03 |
| | | | | 21 | Memvalidasi hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | 2,25 | 0,04 | 56,25 | 2 | 112,50 | 0,09 |
| | | | | 22 | Memvalidasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung | 2,25 | 0,04 | 56,25 | 2 | 112,50 | 0,09 |
| | | B | Penyusunan Hasil Analisis undang-undang/peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi | 23 | Menyusun anotasi perubahan undang-undang akibat putusan Mahkamah Konstitusi | 3,29 | 0,04 | 82,25 | 2 | 164,50 | 0,13 |
| | | | | 24 | Menyusun anotasi perubahan peraturan perundang-undangan akibat putusan Mahkamah Agung. | 3,32 | 0,04 | 83,00 | 2 | 166,00 | 0,13 |
| | | | | 25 | Menyusun <i>Policy Brief</i> hasil analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi | 4,33 | 0,04 | 108,25 | 2 | 216,50 | 0,17 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|------|------|--------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | 26 | Menyusun <i>Policy Brief</i> hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. | 4,28 | 0,04 | 107,00 | 2 | 214,00 | 0,17 |
| | | | | | | | | JUMLAH | 11,175 | 8,9400 |
| | | | | | | | | $\frac{\sum WPV}{1.250}$ | 11.175/1.250 | 8,9400 |
| | | | | | | | | Pembulatan | | 9 Analis Pemantauan Ahli Utama |

Total Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Ahli Utama adalah:

$$\begin{aligned} \text{Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan} &= (\sum WPV / 1250) \times \text{orang} \\ &= (11.175 / 1250) \\ &= 8.9400 \\ &= 9 \text{ orang (pembulatan ke atas)} \end{aligned}$$

Jadi jumlah Formasi Jabatan Fungsional Analis Pemantauan untuk jenjang Ahli Utama adalah 9 orang.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA YSKANDAR
NIP. 196611441997031001